BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memperoleh pijakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, konsep, dan pendekatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan sangat berguna dalam menganalisa masalah. Tujuannya adalah agar jalannya penelitian konsisten dari awal hingga akhir dan dapat mencapai tujuan penelitian sebagaimana telah dituliskan sebelumnya dalam Bab I, konsep dan teori serta pendekatan yang akan diuraikan dalam Bab II ini mempunyai relevansi terhadap masalah yang akan diteliti.

2.1 Hubungan Internasional

Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. *The Dictionary of World Politics* mengartikan istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (Evans dan Newnham, 1990: 194).

Hubungan internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara

resmi, maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (May Rudy, 1993: 3).

Hubungan internasional juga mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'oed, 1994: 28).

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kurang relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan (Mas'oed, 1994: 271).

Secara sekilas, istilah hubungan internasional bisa diartikan sebagai suatu interaksi para aktor hubungan internasional yang melewati batas-batas yuridis suatu negara, tetapi apabila diamati lebih dalam lagi ternyata istilah ini memiliki beberapa arti. Trygve Mathisen di dalam bukunya yang berjudul *Methodology in the Study of International Relation*, mencatat bahwa hubungan internasional mempunyai beberapa macam arti, yaitu:

1. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
2. Sejarah baru dari politik internasional.

3. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.
4. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri (Wiriaatmadja, 1967: 1-2).

Konsep interaksi mengandung arti saling mempengaruhi, bercirikan adanya dua atau lebih unit yang berhubungan, cara bertindak atau kondisi-kondisi beberapa unit yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh unit lain yang dapat melakukan aksi untuk mencapai suatu tujuan (Coulombis dan Wolfe, 1990: 30). Seperti yang dikemukakan oleh Holsti, bahwa istilah hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak (Holsti, 1992: 29). Jadi dapat disimpulkan bahwa studi hubungan internasional pada dasarnya mempelajari interaksi yang melintasi batas-batas negara yang dilakukan oleh aktor negara, maupun aktor non-negara yang juga melibatkan macam-macam sektor kehidupan didalamnya, seperti: ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

2.2 Pluralisme Dalam Hubungan Internasional

Pandangan kaum pluralis mengenai Hubungan Internasional didasarkan pada asumsi-asumsi, yaitu antara lain:

1. Aktor non-negara merupakan bagian penting dalam politik dunia.

2. Negara bukanlah aktor kesatuan karena didalamnya terdapat individu, kelompok individu, kelompok kepentingan, dan birokrasi. Di dalam negara terdapat pula interaksi antara individu dan kelompok. Bentuknya dapat berupa kompetisi, koalisi, kompromi, dan opini publik. Pengaruh-pengaruh dari luar yang melewati batas-batas negara seperti paham ideologi, nilai-nilai, organisasi internasional dan organisasi transnasional, kelompok-kelompok kepentingan serta opini publik.
3. Kaum pluralis menolak asumsi kaum realis bahwa negara adalah aktor yang rasional, karena menurut kaum pluralis, negara adalah aktor rasional yang kompleks, maka berbagai masalah belum tentu dapat didasarkan dengan pembuatan keputusan yang rasional.
4. Menurut kaum pluralis, agenda dari politik internasional harus diperluas. Selain keamanan nasional, hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah ekonomi, sosial, dan ekologi yang meningkat pesat seiring dengan adanya interdependensi di antara negara-negara dan masyarakat dunia (Viotti dan Kauppi, 1990: 228-229).

2.3 Organisasi Internasional

2.3.1 Definisi Organisasi Internasional

Organisasi internasional tumbuh karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat dunia terhadap perlunya suatu wadah untuk melaksanakan kerjasama internasional, dengan kata lain negara-negara menyadari perlu adanya organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Organisasi

internasional awalnya terjadi ketika terbentuk kesepakatan antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian.

Berbagai definisi mengenai organisasi internasional dikemukakan untuk membantu memahami pentingnya peran dari organisasi internasional dalam pergaulan internasional dan diakui sebagai aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (May Rudy, 2005: 3).

Berdasarkan pengertian tersebut dikemukakan bahwa organisasi menurut May Rudy, terdiri dari beberapa unsur:

1. kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
2. mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. baik antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (May Rudy, 2005: 3-4).

Organisasi internasional diartikan sebagai institusi yang melewati batas-batas negara dan memudahkan kerjasama di antara anggota-anggota dari organisasi sebagai institusi, organisasi internasional dapat menjadi wadah untuk

mengatasi berbagai permasalahan seperti keamanan, ekonomi, dan sosial (Henderson, 1998: 385).

Organisasi internasional menurut Clive Archer adalah organisasi yang formal, ditetapkannya struktur yang berkelanjutan melalui persetujuan di antara anggota-anggota, baik perwakilan dari pemerintah maupun bukan dari pemerintah yang setidaknya terdiri dari dua negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan dari para anggotanya (Perwita dan Yani, 2005: 92).

2.3.2 Klasifikasi Organisasi Internasional

Menurut K. G. Saur Verlag, istilah organisasi internasional umumnya untuk menjelaskan klasifikasi baik organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organizations*) dan organisasi internasional non-pemerintah (*international non-governmental organizations*) (Toma dan Gorman, 1991: 250).

2.3.2.1 *Intergovernmental Organizations* (IGOs)

Menurut Edward H. Buehrig, *Intergovernmental Organizations* (IGOs) merupakan kumpulan atau anggotanya terdiri dari negara-negara. IGOs dibentuk oleh negara-negara untuk memudahkan dan mengatur hubungan di antara negara-negara. IGOs dapat dibentuk secara bilateral, regional atau juga universal. Umumnya IGOs memperoleh otoritas dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara walau pada saat sekarang IGOs umumnya dibentuk di bawah pimpinan atau perlindungan dari organisasi-organisasi yang ada (Toma dan

Gorman, 1991: 250). IGOs memiliki dana, pertemuan-pertemuan rutin, markas besar, dan sekretariat yang merupakan badan yang menjalankan program yang telah disusun oleh para anggotanya (Toma dan Gorman, 1991: 250-251).

2.3.2.2 *International Non-Governmental Organizations* (INGOs)

International Non-Governmental Organizations (INGOs) merupakan organisasi-organisasi swasta dimana setiap individu-individu dari berbagai negara yang menyebar dan melintasi batas-batas negara serta dapat membuat suatu lingkungan masyarakat global dibanding aktor lainnya (Henderson, 1998: 450).

INGOs menurut Clive Archer terdiri dari anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan dari negara-negara atau pemerintah-pemerintah, namun merupakan suatu kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi, ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-pemerintah (*non-governmental actors*) pada tingkat internasional dan aktivitas-aktivitas mereka membuat meningkatnya interaksi-interaksi transnasional (Archer, 1983: 40).

Clive Archer menambahkan bahwa terdapat banyak organisasi-organisasi bahkan pada awal tahun 1960-an, bukti cukup banyak yang menunjukkan bahwa beberapa kesatuan-kesatuan non-pemerintah termasuk organisasi-organisasi internasional yang mampu mempengaruhi pada peristiwa-peristiwa internasional (Archer, 1983: 142).

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan

hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui keberadaan organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang makin banyak jumlahnya.

Non-Governmental Organizations (NGOs) merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara dimana kegiatan yang dilakukannya secara sukarela (*non-profit making purposes*). Terjadinya perubahan-perubahan di dunia serta kemajuan di dalam bidang komunikasi mendorong berkembangnya NGOs. NGOs memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut:

1. Inisiatif Sendiri (*Private Initiative*), merupakan kenyataan yang dilakukan secara spontan yang terlihat di dalam lingkungan internasional, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pemerintah (negara). NGOs juga merekrut individu-individu yang tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah maupun *Intergovernmental Organizations* (IGOs).
2. Spontanitas (*Spontanity*), dimana pada umumnya NGOs dibentuk oleh sekelompok orang-orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan bahwa negara maupun negara-bangsa tidak mampu mewujudkan aspirasi maupun keinginan masyarakat.
3. Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja dari suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga individu-individu yang ada mampu berperan dinamis di dalam lingkungan internasional (Merle, 1987: 308-309).

Kriteria persyaratan bagi INGO menurut *The Union of International Association*, adalah:

1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat atau berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekedar hubungan bilateral (antara dua negara), atau sekurang-kurangnya mencakup kegiatan organisasi pada tiga negara.
2. Keanggotaannya harus terbuka, mencakup individu-individu serta kelompok-kelompok di wilayah atau negara yang termasuk dalam ruang lingkup organisasi tersebut, dengan sekurang-kurangnya tiga negara.
3. Anggaran Dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan atau pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala atau periodik, dengan tata cara pemilihan yang disusun sedemikian rupa guna menghindari pengisian jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi hanya oleh orang-orang dari satu negara saja.
4. Pendanaan atau pembiayaan pokok (substansial) bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan dari sekurang-kurangnya tiga negara (May Rudy, 2005: 20).

NGOs adalah aktor non-negara, tetapi memiliki sifat yang sama kuatnya dan dapat melewati batas negara. NGOs yang didirikan oleh sekelompok individu atau kelompok domestik yang bukan sebagai perwakilan dari pemerintah. Aktor ini masuk dalam analisis sistem dunia karena peranannya dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara yang bersangkutan. Menurut *Union of International*

Association, ada beberapa tipe dari NGO yang bergerak dalam bidang yang berbeda, seperti:

1. Bidang industri.
2. Bidang kesehatan dan obat-obatan.
3. Bidang ilmu pengetahuan.
4. Bidang hubungan internasional.

Sedangkan di antara tahun 1957-1971 bidang-bidang tersebut berkembang dan meningkat menjadi:

1. Teknologi.
2. Pertanian.
3. Ilmu pengetahuan.
4. Perekonomian dan keuangan.
5. Lingkungan hidup (Bennet, 1997: 355).

Akibat dari perkembangan yang ada, organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam menangani masalah lingkungan hidup terus berkembang sampai mereka memiliki kekuatan dalam konstelasi politik internasional. Sekitar tahun 1980-an, NGOs di dunia terfokus pada kelompok atau organisasi lingkungan hidup seperti *Greenpeace*, *Sierra Club*, *World Wildlife Fund* (WWF) dan lain-lainnya.

Kemampuan dari organisasi ini menjadikan mereka memiliki karakter tersendiri atau karakter yang berbeda dari NGO lainnya. Karakteristik dasar mereka adalah:

1. Memiliki pendukung dengan jumlah yang banyak di seluruh dunia dengan jaringan organisasi yang menyebar di seluruh dunia.
2. Memiliki fasilitas peralatan dan sumber daya yang dibangun sendiri yang berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan dalam perlindungan lingkungan hidup di dunia.
3. Memiliki kemampuan dalam melakukan *lobby* politik dengan para pejabat pemerintahan atau pun pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan di suatu negara.
4. Mampu melakukan penelitian-penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat internasional tentang masalah yang terjadi dalam ekosistem dunia.
5. Memiliki hubungan yang efektif dengan media massa yang berfungsi sebagai benang merah terhadap masyarakat internasional dalam memandang penyalahgunaan dan perlakuan yang semena-mena terhadap lingkungan hidup.
6. Memiliki peranan yang besar dan aktif dalam forum-forum pembicaraan yang membahas masalah lingkungan di dunia seperti dalam KTT Bumi di Rio de Jenairo pada tahun 1992 dan 1997.
7. Memiliki peranan yang aktif dalam menentukan kebijakan dalam menangani masalah lingkungan. Mementingkan solusi atau pemecahan masalah bukan pertentangan atau konflik.

8. Mampu membangun jaringan kerja seluas-luasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut (Hurrell dan Kingsbury, 1992: 113-114).

Aktor-aktor non-negara seperti Greenpeace, khususnya yang bergerak dalam bidang lingkungan memiliki tujuan untuk menanggulangi permasalahan yang muncul akibat dari ketidakseimbangan ekosistem manusia dan lingkungannya. Dalam hal ini berarti Greenpeace memiliki tujuan yang khusus tetapi menangani isu yang global (Hurrell dan Kingsbury, 1992: 113).

2.3.3 Peran Organisasi Internasional Dalam Sistem Internasional

Menurut Keohane dan Nye, organisasi internasional berperan penting di dalam membantu negara melakukan *bargaining* (tawar-menawar), menyusun rencana untuk agenda-agenda dalam konferensi-konferensi serta dapat membantu memberikan masukan dalam kebijakan global. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi tujuan dan perbuatan terhadap lingkungan hidup, perdagangan dan permasalahan keuangan, peraturan-peraturan tentang kelautan dan isu-isu area lainnya yang menjadi perhatian bagi negara-negara maupun aktor-aktor non-negara (Henderson, 1998: 88).

Ada 3 (tiga) peran utama yang dapat diidentifikasikan dari organisasi internasional di dalam sistem internasional, yaitu antara lain:

1. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berdebat, maupun menggalang kerjasama.
3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan (salah satunya adalah bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup) tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (May Rudy, 2005: 29).

Bermunculannya aktivitas organisasi non-pemerintah telah mampu menembus batas-batas nasional dan mampu melakukan perbaikan-perbaikan di dalam komunikasi dimana setiap individu dapat membuat agenda-agenda yang umum dan hal-hal yang nyata pada level internasional (http://www.ciaonet.org, diakses pada tanggal 2 Juli 2008).

Aktor non-negara (*Non-Governmental Organization* atau *International Non-Governmental Organization*) dapat berperan dalam politik internasional, yaitu dengan:

1. Membawa suatu isu pada agenda diplomatik internasional.
2. Publikasi dan menyadarkan warga dunia mengenai masalah-masalah global maupun regional.
3. Melakukan *lobby* kepada pemerintah-pemerintah nasional dan organisasi internasional untuk membuat keputusan-keputusan yang akan dibuat.

4. Mencari suatu hasil melalui aksi langsung (*direct action*), kadang (walau jarang) melalui ancaman (*threat*) atau pun menggunakan kekuatan (*force*) (Holsti, 1992: 64).

Keempat ciri-ciri di atas sudah dilakukan oleh pergerakan yang dilakukan Greenpeace. Greenpeace sebagai aktor non-negara yang peduli terhadap lingkungan merupakan badan yang independen. Sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO), Greenpeace sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi kegiatannya mencakup apa yang dilakukan oleh organisasi internasional lainnya, khususnya mengenai lingkungan hidup (Holsti, 1992: 64).

2.4 Teori Kampanye

Kampanye dapat dilakukan secara lokal, regional maupun global. Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi. Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Merujuk pada definisi ini maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal, yakni:

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar.
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.

4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Di samping keempat ciri pokok di atas, kampanye juga memiliki karakteristik lain, yaitu sumber jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (*campaign makers*), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat (Venus, 2004: 7).

Menurut Pfau dan Parrot (1993), kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (Venus, 2004: 8).

Menurut Leslie B. Snyder, kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu (Venus, 2004: 8).

Menurut Rajasundaram, kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya (Venus, 2004: 8).

Ada tiga jenis kampanye, membicarakan jenis-jenis kampanye pada prinsipnya adalah membicarakan motivasi yang melatarbelakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. Motivasi tersebut pada gilirannya akan menentukan ke arah mana kampanye akan digerakkan dan apa tujuan yang

akan dicapai. Jadi secara inheren ada keterkaitan antara motivasi dan tujuan kampanye.

Bertolak dari keterkaitan tersebut, Charles U. Larson (1992) kemudian membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori, yakni:

1. *Product-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi dilingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah *commercial campaigns* atau *corporate campaign*. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipatgandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan. Contohnya adalah kampanye *Public Relations* yang ditujukan untuk membangun citra positif perusahaan di mata publik.
2. *Candidate-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai *political campaigns* (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. Contohnya adalah kampanye pemilu, kampanye penggalangan dana bagi partai politik dan sebagainya.
3. *Ideologically or cause oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali

> berdimensi perubahan sosial. Karena itu kampanye jenis ini dalam istilah Kotler disebut sebagai *social change campaigns*, yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Pada dasarnya berbagai jenis kampanye yang tidak termasuk dalam kategori kampanye politik atau kampanye produk dapat dimasukkan ke dalam kampanye perubahan sosial. Dengan demikian cakupan jenis kampanye ini sangat luas mulai dari kampanye di bidang kesehatan, kampanye lingkungan hidup, kampanye pendidikan, dan sebagainya (Venus, 2004: 10-12).

Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace termasuk ke dalam jenis kampanye *Ideologically or cause oriented campaigns* atau *social change campaigns*.

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. Penyelenggara kampanye umumnya bukanlah individu melainkan organisasi atau lembaga. Tujuannya sangat beraneka ragam, tergantung kepentingan dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Pfau dan Parrot (1993), apapun tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioural*). Ostergaard (2002) menyebut ketiga aspek tersebut dengan istilah '3A' sebagai kependekan dari *awareness, attitude,* dan *action*. Ketiga aspek ini saling terkait dan merupakan sasaran pengaruh (*target of influence*) yang harus dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta (Venus, 2004: 9-10). Ada tiga tahap yang dilakukan dalam kampanye, yaitu:

1. Kegiatan kampanye pada tahap pertama biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini, pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak tentang isu tertentu. Dalam konsep Ostergaard tahap ini merupakan tahap *awareness* yakni menggugah kesadaran, menarik perhatian, dan memberi informasi tentang produk, atau gagasan yang dikampanyekan.
2. Pada tahap kedua ini, kampanye diarahkan pada perubahan dalam sikap (*attitude*). Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. Pada tahap terakhir ini, kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. Tindakan tersebut dapat bersifat 'sekali itu saja' atau terus-menerus (berkelanjutan) (Venus, 2004: 10).

Inti dari kampanye tidak lain adalah pesan. Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baligo (*billboard*), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Banyak hal yang terkait dengan isi pesan, mulai dari materi pendukungnya, visualisasi pesan, isi negatif pesan, pendekatan emosional, pendekatan rasa takut, serta kreativitas. Isi pesan-pesan kampanye juga harus menyertakan visualisasi mengenai dampak

positif atas respon tertentu yang diharapkan muncul dari khalayak sasaran. Makin nyata visualisasi konsekuensi pesan, makin mudah khalayak mengevaluasi pesan tersebut dan makin cepat mereka menentukan sikap untuk menerima atau menolak isi pesan. Pesan kampanye yang efektif adalah pesan yang menginformasikan dengan segera kejadian penting yang sedang terjadi di sekitar khalayak sasarannya, sehingga mudah dikenal dan ditanggapi oleh khalayak. Penggunaan hal-hal yang menggambarkan sesuatu secara visual juga mampu menarik perhatian khalayak. Kegiatan kampanye dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari dialog politik dalam ruangan yang menggunakan media presentasi *power point*, hingga yang menggunakan media massa cetak dan elektronik (Venus, 2004: 70, 71, 72, 80).

Menurut Michael L. Rothschild, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sebuah program kampanye menjadi tidak sia-sia, yaitu:

1. Arti penting objek kampanye, berkaitan dengan tingkat kepentingan isu-isu yang dikampanyekan. Semakin rendah arti penting sebuah isu maka semakin rendah pula tingkat perhatian yang akan diberikan khalayak terhadap isu tersebut. Implikasinya adalah kita harus mempertimbangkan secara rasional dan realistis apakah suatu isu cukup penting untuk dikampanyekan.
2. Kadar keterlibatan, menunjukan sejauh mana khalayak telah terlibat dengan isu tersebut. Semakin tinggi tingkat keterlibatan khalayak, semakin penting arti dan tujuan kampanye tersebut bagi mereka.

3. Rasio manfaat dan pengorbanan, menunjukan kalkulasi manfaat dan pengorbanan yang dikeluarkan khalayak bila mereka menerima dan menerapkan gagasan kampanye tersebut.
4. Tuntutan aktual dari lingkungan, menyoroti pandangan dan tuntutan khalayak terhadap isu-isu tertentu. Bila masyarakat menganggap bahwa yang dikampanyekan itu juga keinginan potensial dan harapan kolektif masyarakat, maka program kampanye akan mendapat dukungan dari masyarakat.
5. Segmentasi, menegaskan bahwa gagasan yang tidak memiliki segmen khalayak yang jelas akan mendapat perhatian yang kecil (Venus, 2004: 132).

2.5 Lingkungan Hidup

2.5.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup secara umum menurut *Webster's New Collegiate Dictionary* adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme (*International Ensyclopedia of the Social Science Volume 5*, 1968: 178). Sedangkan menurut Emil Salim dalam bukunya *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, menyebutkan bahwa: secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Pengertian lingkungan hidup lainnya menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, yaitu: "Lingkungan Hidup merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak-hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya" (Soemarwoto, 1991: 48). Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut N.H.T. Siahaan, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya (Siahaan, 1987: 230).

Secara ekologis (Secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004: 10). Komponen yang berada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang (Suratmo, 2004: 4). Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Sebaiknya keutuhan lingkungan hidup tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai penyedia sumber daya alam

serta daya dukung kehidupan yang dieksploitasi, tetapi juga sebagai sumber tempat hidup yang mensyaratkan adanya keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup (Soemarwoto, 1991: 1-2).

Bila berbicara mengenai masalah lingkungan hidup terdapat dua perdebatan yaitu antara kaum modernis dan ekoradikal. Kaum modernis meyakini bahwa kemajuan pengetahuan ilmiah dan kemampuan teknologi yang berkesinambungan akan mempertinggi kemampuan kita dalam menguasai lingkungan. Dengan kata lain dapat meningkatkan keahlian dan teknik produksi dan konsumsi dengan cara ramah lingkungan. Sedangkan kaum ekoradikal berpendapat bahwa ekosistem mempunyai kapasitas yang terbatas, seperti batas kemampuan sumber daya alam dalam menyediakan bahan pangan bagi populasi makhluk hidup yang terus meningkat. Penganut ekoradikal menemukan bahwa kumpulan manusia di bumi bergerak secara berbahaya mendekati batas kemampuan planet dalam menanggung beban, mereka juga berpikir bahwa tidak ada teknologi perbaikan sederhana yang dapat menyelesaikan masalah ini. Untuk itu banyak pakar ekoradikal yang ditugaskan untuk mengontrol populasi dengan tepat, perubahan gaya hidup yang besar menuju kemajuan yang lebih bersahabat dengan lingkungan, pengurangan orientasi konsumsi, dan cara produksi hidup yang berlebihan (Jackson dan Sorensen, 1999: 325).

Dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Sumber daya yang tersembunyi dalam komponen sosial berupa akal-pikiran dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya untuk mendapatkan cara pencapaian sasaran tersebut. Melalui akal-pikiran manusia menciptakan peralatan baru yang berupa mesin-mesin dan alat-alat bantu lainnya yang berteknologi tinggi, untuk dapat menghasilkan produk yang melimpah dalam waktu yang singkat.

Pemakaian mesin dan peralatan baru dalam bidang industri serta pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan produk yang tinggi diharapkan akan dapat mencapai sasaran kualitas hidup manusia yang lebih baik. Dengan menggunakan mesin dan peralatan berteknologi tinggi manusia dapat mengeruk kekayaan alam secara besar-besaran. Tambang-tambang baru dibuka untuk mencari mineral-mineral yang sangat dibutuhkan, kemudian dikirim ke industri-industri untuk diolah sehingga menjadi barang jadi.

Kegiatan tersebut dari hari ke hari makin meningkat, seolah-olah sasaran yang hendak dicapai, yaitu peningkatan kualitas hidup, sudah makin dekat untuk tercapai. Namun dalam kenyataannya, kualitas hidup yang hendak dicapai terasa masih sulit dijangkau, bahkan mungkin terasa makin jauh dari jangkauan. Dampak terhadap lingkungan dapat mengurangi daya dukung alam yang berarti akan mengurangi kemampuan alam untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Sedangkan dampaknya terhadap manusia, jelas akan mengurangi atau bahkan mungkin akan menurunkan kualitas hidup manusia itu sendiri. (Wardhana, 2004: 19-20).

Diakui pula bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, industri, dan teknologi yang pesat saat ini menjadikan sumber daya alam bukan lagi merupakan satu-satunya penentu tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Namun,

bagaimanapun juga sumber daya alam tetap menjadi modal dasar bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi berfungsi sebagai alat pengolah sumber daya alam yang akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kehidupan manusia beserta segala aktifitasnya memerlukan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan alam atau ekosistem alamiah (Ekosistem adalah sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai spesies tanaman, hewan, dan mikroba yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan mereka) dalam menyediakan sumber daya alam, dan jasa-jasa lingkungan tersebut bersifat terbatas. Di samping itu bagi perkembangan teknologi yang semakin canggih dewasa ini, sumber daya alam dapat habis dalam waktu beberapa puluh tahun saja karena laju penggunaannya yang melampaui kapasitas pemulihan sumber daya alam secara alami.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, terutama hasil minyak buminya. Pengertian sumber daya alam menurut Gunarwan Suratmo dalam bukunya *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* adalah: “Sumber Daya Alam adalah Segala sesuatu di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang telah digunakan masa kini atau yang akan digunakan di masa yang akan datang”.

2.5.2 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Berakhirnya Perang Dingin telah mendorong isu-isu lingkungan mengemuka dalam agenda internasional. Bersamaan dengan berkurangnya hirauan terhadap isu-isu keamanan dan militer yang sangat mengemuka pada masa Perang Dingin berlangsung, perhatian terhadap isu-isu keamanan lingkungan hidup meningkat. Dimensi global dalam masalah-masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah dapat dilihat sejak dulu, misalnya polusi industri yang melewati batas, penurunan kualitas sungai atau polusi laut yang menjadi batas antar negara. Namun skala dan kualitas permasalahan tersebut meningkat secara drastis sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, laju industrialisasi yang sangat cepat, dan penggunaan bahan bakar yang meningkat (Miller, 1995: 1-4).

Dewasa ini, permasalahan lingkungan hidup begitu meluas dan terasa sangat penting sehingga melibatkan bermacam-macam aktor dan isu lainnya dalam arena internasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia pada umumnya dan elit politik di banyak negara, khususnya yang berhubungan dengan kenyataan bahwa persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup ini sudah menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat penipisan ozon. Faktor lain yang menyebabkan isu ini begitu meluas adalah gencarnya kampanye yang dilakukan terutama oleh negara-negara Barat melalui media massa, bidang keilmuan, teknologi, dan jalur-jalur lainnya (Mas’oed dan Arfani, 1992: 50).

Isu lingkungan hidup global mengalami peningkatan yang pesat bukan hanya jumlah dan jangkauan isunya yang melewati batas-batas negara. Perkembangannya diidentifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Masalah kemanusiaan seperti dalam mengontrol perubahan iklim, emisi dari efek rumah kaca, perlindungan kawasan seperti kawasan Antartika dan hutan Amazon, dan perlindungan terhadap dasar laut.
2. Meningkatnya jumlah masalah lingkungan hidup seperti penggundulan hutan, penurunan kadar garam, perusakan air tanah yang semakin luas mengancam akibat dari kelemahan ekonomi dan sosial negara-negara miskin. Hal ini dapat mempengaruhi kepentingan politik dan keamanan dari negara-negara berkembang.
3. Meningkatnya globalisasi yang berawal dari lingkungan yang kompleks dari masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh negara-negara industri sehingga menyebabkan adanya pemakaian sumber daya alam yang berlebihan bagi kepentingan ekonomi dan perindustrian (Hurrell dan Kingsbury, 1992: 2-3).

Selain itu, menurut John Baylis dan Steve Smith berpendapat bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global disebabkan oleh karena:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, permasalahan yang menyangkut CFCs (*Cholroflourocarbons)* berefek pada pemanasan global (*global warming)* dan meningkatkan jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia.

2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah disekitarnya (misalnya kebakaran hutan).
4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan lain sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global (Perwita dan Yani, 2005: 144).

Selain itu isu-isu lingkungan hidup yang kini semakin mengemuka juga merupakan hasil dari beberapa hal-hal tersebut antara lain adalah meningkatnya kesadaran manusia akan kerusakan hidup yang terjadi yang disebabkan oleh semakin tingginya aktivitas-aktivitas ekonomi dan pertumbuhan populasi yang sangat cepat, munculnya persepsi "*earth as a single biosfere*" (bumi sebagai satu-satunya tempat hidup), dan berakhirnya Perang Dingin.

Isu-isu lingkungan hidup global dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: yakni isu-isu yang mencakup masalah bersama global (atmosfir, air, dan sebagainya) dan isu-isu yang memiliki arti penting seluruh dunia, namun tidak secara langsung melibatkan masalah bersama global (keanekaragaman hayati,

degradasi lahan, dan sebagainya). Atas dasar kajian ilmiah mutakhir, isu-isu lingkungan global yang paling penting untuk abad ini yang membutuhkan tindakan mendesak adalah pemanasan global dan perubahan iklim global (*The World Bank*, 2001: 138).

2.6 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Sustainable Development (pembangunan berkelanjutan) pada dasarnya menghimbau para pelaku pembangunan agar lebih memperhatikan faktor keterbatasan sumber-sumber alam, seperti:

1. Tanah atau daratan dan pelbagai makhluk yang hidup didalamnya: terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan hewan.
2. Habitat air (seperti lautan, danau, sungai, dan lain-lain) serta pelbagai organisme akuatik seperti ikan, rumput laut, plankton, dan lain-lain.
3. Udara serta atmosfer yang mendukung kehidupan organisme dan mikroorganisme (Hadiwinata, 2002: 209-210).

Pembangunan berkelanjutan lahir dari kesadaran akan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata menuju kepada pembangunan yang berorientasi kepada keberlanjutan atau sustainabilitas. Konsep berkelanjutan ini dicetuskan oleh kaum environmentalis yang berawal dari keprihatinan mereka terhadap konsekuensi jangka panjang dari adanya tekanan yang diakibatkan oleh pembangunan terhadap daya dukung alami.

Pembangunan adalah sebuah proses produksi dan konsumsi dimana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi seperti mesin-mesin

(*capital*), pekerja (*labor* atau *human resources*), dan lain-lain. Pada prosesnya, pembangunan membawa dampak (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan; Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); Benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu) kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan itu sendiri (http://www.pelangi.or.id, diakses pada tanggal 24 Oktober 2008).

Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan saat ini yang tidak mengurangi kesempatan dari generasi mendatang untuk membangun. Secara statik pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan yang secara serentak membangun ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak boleh berdampak pada pengrusakan pranata sosial dan lingkungan (http://www.pelangi.or.id, diakses pada tanggal 24 Oktober 2008).

Selain itu menurut Muhamad Erwin pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya (Erwin, 2007: 51).

Ada tiga hal penting yang tercakup dalam *sustainable development*, yaitu:

1. Pengelolaan sumber alam secara bijaksana.
2. Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa.
3. Peningkatan kualitas hidup (Soemartono, 1996: 199).

Pembangunan berkelanjutan ini diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara aspek alam dan aspek ekonomis. Kesadaran akan ada batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan batas kemampuan biosfer untuk dapat menyerap kegiatan manusia – meskipun melalui penguasaan teknologi batas tadi menjadi relatif – melahirkan pembangunan berkelanjutan dimana eksploitasi sumber daya alam, arah, investasi, orientasi kelembagaan, konsisten dengan kebutuhan saat ini dan saat mendatang. Meskipun definisinya cukup banyak, pada dasarnya istilah berkelanjutan mengacu pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Hal yang penting terkandung dalam pernyataan di atas adalah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh lingkungan hidup yang ada pada saat ini (Todaro, 2000: 367).

Oleh karena itu para perencana pembangunan harus melibatkan perhitungan lingkungan (*environmental accounting*) dalam perumusan kebijakan-kebijakan mereka. Sebagai satu contoh, kelestarian, atau sebaliknya kerusakan lingkungan hidup harus dihitung sebagai faktor penambah atau pengurang tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemajuan kesejahteraan penduduk secara agregat.

Pembangunan berkelanjutan adalah tahap baru dalam kehidupan ekonomi, kriteria pertumbuhan yang diinginkan harus disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekologi. Pembangunan yang berkelanjutan pada penghayatan kewajiban untuk mencari keselarasan dengan sesama manusia dan dengan alam. Aturan yang

menjadi panduan dalam hal ini, bahwa manusia tidak boleh serakah dan bersama-sama memelihara bumi. Ini mengandung arti bahwa umat manusia harus mengambil gaya hidup dan metode pembangunan yang menghormati dan berkiprah dalam batas-batas alam. Ini dapat dilakukan tanpa harus menolak berbagai manfaat yang telah diberikan teknologi moderen, asalkan teknologi itu bekerja pada batas-batas yang sama.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Didalamnya terkandung dua gagasan penting:

1. Gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia.
2. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan (Djajadiningrat, 2001: 27).

Pembangunan yang berkelanjutan *(Sustainable Development)*, merupakan sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan yang menghimbau para pelaku pembangunan lebih memerhatikan faktor keterbatasan sumber-sumber alam dalam mendesain konsep pembangunan, yang terdiri dari:

1. Pembangunan berkelanjutan lebih cenderung untuk menganggap bahwa satu-satunya faktor yang membatasi produksi adalah keterbatasan persediaan sumber-sumber alam.

2. Pembangunan berkelanjutan mendasarkan pada moralitas bahwa sumber-sumber alam perlu untuk dipertahankan kelestariannya agar dapat dikonsumsi oleh generasi-generasi selanjutnya.
3. Pembangunan berkelanjutan berpendapat bahwa prosedur akunting pembangunan seharusnya memasukkan faktor-faktor kerusakan lingkungan sebagai bagian dari biaya-biaya sosial yang harus dipikul oleh para pelaku ekonomi.
4. Pembangunan berkelanjutan menganggap bahwa keterbatasan kapasitas alam dalam menyerap limbah industri harus diperhitungkan oleh para pelaku bisnis untuk secara sukarela mengurangi pembuangan limbah (terutama yang beracun) (Mikesell, 1995: 67).

Prinsip-prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan dapat diringkas menjadi empat hal yaitu, pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi perspektif jangka panjang:

1. Pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan dan keadilan sosial.

   Kepedulian utama dari suatu pembangunan yang berkelanjutan adalah menjawab pertanyaan tentang pemerataan untuk generasi masa kini dan generasi mendatang. Strategi pembangunan harus dilandasi “premis” pada hal seperti; lebih meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, lebih meratanya peran dan kesempatan perempuan, dan pada pemerataan ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Akan tetapi, pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Karena pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung

dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh (global), kesenjangan pendapatan negara-negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya menjadi kepedulian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini harus selalu mengindahkan generasi masa datang untuk mencapai kebutuhannya.

2. Pembangunan berkelanjutan menghargai keanekaragaman.

   Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan tatanan lingkungan (ekosistem). Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

3. Pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan integratif.

   Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial, dan dengan menggunakan pengertian ini melaksanakan cara-cara yang lebih integratif

dalam pelaksanaan pembangunan, keberlanjutan masa depan dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama kelembagaan.

4. Pembangunan berkelanjutan meminta perspektif jangka panjang.

   Masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi-asumsi normal dalam prosedur "pemotongan" (*discounting*). Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan hingga saat ini, kerangka jangka pendek mendominasikan pemikiran para pengambil keputusan ekonomi (Djajadiningrat, 2001: 31-32).

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian hal-hal di bawah ini:

1. Keberlanjutan ekologis.

   Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup.

2. Keberlanjutan ekonomi.

   Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal yang utama yang keduanya memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan keberlanjutan aspek lainnya. Kedua aspek tersebut adalah *keberlanjutan ekonomi makro*; menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional, *keberlanjutan ekonomi sektoral*; penyesuaian kebijaksanaan yang

meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah.

3. Keberlanjutan sosial-budaya.

   Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial mempunyai empat sasaran, yaitu stabilitas penduduk, memenuhi kebutuhan dasar manusia, mempertahankan keanekaragaman budaya, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

4. Keberlanjutan politik.

   Tujuan dari keberlanjutan politik adalah *pertama*, menghormati hak asasi manusia (HAM). *Kedua*, demokrasi. Dan yang *ketiga*, kepastian ekologis.

5. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

   Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang secara langsung dan secara tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa (Djajadiningrat, 2001: 32).